

DAMPAK PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PERAN
GENDER DI NAGARI INDUDUR, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI
SUMATERA BARAT

Tesis



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya, nama : Dwi Mulyani, yang beralamat di Jl Padang Pasir Raya No 37 RT 001 RW 002 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kode Pos 25112, Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Padang, 9 Agustus 2026

Penulis,

Dwi Mulyani

DAMPAK PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PERAN GENDER DI NAGARI INDUDUR, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh : DWI MULYANI (2421632003).

(Dibawah bimbingan: Vonny Indah Mutiara, S.P., MEM., Ph.D. dan Mahdi, S.P., M.Si.,
Ph.D)

Abstrak

Pengembangan perhutanan sosial merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat, yang implementasinya dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya dan kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek sosial-budaya dan adat lokal Minangkabau yang membentuk pengembangan perhutanan sosial serta menganalisis dampaknya terhadap peran gender di Nagari Indudur, Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah nagari, ninik mamak, pengurus perhutanan sosial, serta anggota laki-laki dan perempuan. Data dianalisis secara tematik menggunakan Gender Analysis Matrix (GAM) yang dimodifikasi pada aspek peran, akses, kontrol, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial-budaya dan adat Minangkabau membentuk pengembangan perhutanan sosial melalui adaptasi kelembagaan, yang tercermin dalam pengelolaan satu izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh enam Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai dengan sistem nagari, hubungan kekerabatan, dan wilayah kelola masyarakat. Pengembangan perhutanan sosial juga memperluas peran perempuan dalam kegiatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), administrasi, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta meningkatkan akses terhadap kelompok dan pelatihan. Namun, laki-laki masih mendominasi pengelolaan kawasan, kegiatan teknis kehutanan, kontrol sumber daya, dan pengambilan keputusan strategis. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial telah memperluas partisipasi perempuan, tetapi transformasi relasi gender masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya mengubah struktur pembagian peran dalam pengelolaan hutan.

Kata kunci: hak kelola sumber daya, kelembagaan lokal, Minangkabau, relasi gender.

THE IMPACT OF SOCIAL FORESTRY DEVELOPMENT ON GENDER ROLES IN NAGARI INDUDUR, SOLOK REGENCY, WEST SUMATRA PROVINCE

by: DWI MULYANI (2421632003)

Supervised by: Vonny Indah Mutiara, S.P., MEM., Ph.D. and Mahdi, S.P., M.Si., Ph.D.

Abstract

Social forestry development is a policy aimed at improving community welfare and promoting forest conservation by providing communities with access to forest management, with implementation shaped by local socio-cultural conditions and institutions. This study aims to identify the Minangkabau socio-cultural and customary values that shape the development of social forestry and to analyze its impacts on gender roles in Nagari Indudur, Solok Regency, West Sumatra. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving purposively selected informants, including village government representatives, *ninik mamak* (customary leaders), social forestry administrators, and male and female community members. Data were analyzed thematically using a modified Gender Analysis Matrix (GAM) focusing on roles, access, control, and decision-making. The findings show that Minangkabau socio-cultural and customary values shape social forestry development through institutional adaptation, reflected in the management of a single Community Forestry (HKm) permit by six Forest Farmer Groups (KTH) in accordance with the *nagari* system, kinship relations, and community management areas. Social forestry development has also expanded women's roles in Social Forestry Business Groups (KUPS), Non-Timber Forest Product (NTFP) processing, administration, financial management, and product marketing, while increasing their access to groups and training opportunities. However, men continue to dominate forest management, technical forestry activities, resource control, and strategic decision-making. These findings indicate that social forestry development has expanded women's participation, but the transformation of gender relations remains gradual and has not yet fundamentally altered the established gender division of roles in forest management.

Keywords: resource management rights, local institutions, Minangkabau, gender relations